

## Komunikasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Provinsi Gorontalo

Faini Basuungi, Andi Yusuf Katili

Stia Bina Taruna Gorontalo

[fainbusu@gmail.com](mailto:fainbusu@gmail.com), [yusuf2801@gmail.com](mailto:yusuf2801@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Komunikasi politik Anggota legislatif Perempuan di DPRD Provinsi Gorontalo dan keterlibatan mereka di bidang politik sebagai anggota legislative. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan teknik pengambilan data yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat Anggota Legislatif Perempuan berjumlah 28.8 % hampir sesuai dengan ketentuan undang-undang pemilu, ada langkah maju dibanding jumlah sebelumnya. Anggota legislatif perempuan di Provinsi Gorontalo, mendapat satu nilai tambah sebab dapat memperjuangkan salah satu bidang yang tadinya dari Biro menjadi Dinas, sehingga perjuangan mereka di ruang sidang bukan cuma isapan jempol, namun sudah menghasilkan satu perjuangan yang di akui oleh kaum mayorotas laki-laki, sehingga hak-hak perempuan sudah terakomodir pada keputusan dan kesepakatan yang di perjuangkan oleh anggota legislatif perempuan yang di DPRD Provinsi Gorontalo. Kesimpulan yang dapat di ambil dari hasil penelitian bahwa anggota legislatif Perempuan di DPRD Provinsi Gorontalo, mendapat dukungan dari kaum mayoritas, dan memberikan kemajuan jumlah kursi yang ada sebelumnya, sehingga perjuangan hak-hak perempuan mendapat perhatian yang lebih baik, dari Biro pemberdayaan Perempuan menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, bukti kejelasan kerja anggota legislatif perempuan selama ini mulai bertahap dalam proses menuju hasil yang maksimal, untuk kepentingan masyarakat. Kata Kunci: **Komunikasi; Anggota Legislatif; Perempuan**

### ABSTRACT

*This research aims to find out how political communication is between female legislative members in the Gorontalo Province DPRD and their involvement in politics as legislative members. This research is descriptive research with data collection techniques, namely, observation, interviews and documentation. The research results found that there were 28.8% female legislative members, almost in accordance with the provisions of the election law, a step forward compared to the previous number. Women legislative members in Gorontalo Province, get an added value because they can fight for one of the fields that was previously from Bureau to Service, so that their struggle in the courtroom is not just a figment, but has resulted in a struggle that is recognized by the majority of men, so that women's rights have been accommodated in decisions and agreements fought for by female legislative members in the Gorontalo Province DPRD. The conclusion that can be drawn from the research results is that female legislative members in the Gorontalo Province DPRD received support from the majority, and provided an increase in the number of seats previously available, so that the struggle for women's rights received better attention, from the Women's Empowerment Bureau to the Department Women's*

*Empowerment, evidence of clarity in the work of female legislative members so far has begun to gradually progress towards maximum results, for the benefit of society.*

*Keywords: Communication; Legislative Member; Woman*

## **PENDAHULUAN**

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari seseorang ke orang lain (Wahyuningrum, 2008). Suatu komunikasi yang tepat tidak bakal terjadi, jika tidak penyampai berita tadi menyampaikan secara patut dan penerima berita menerimanya tidak dalam bentuk distorsi. Menurut Webster istilah komunikasi berasal dari istilah latin *Communicare*, bentuk *participate dari comunikation dan communicatus* yang artinya suatu alat untuk berkomunikasi terutama suatu sistem penyampaian dan penerimaan berita, seperti misalnya telepon, telegraf, radio dan lain sebagainya, komunikasi dapat dikatakan proses penyampaian atau pemberitahuan dan penerimaan suatu keterangan, tanda atau kabar lewat pembicaraan, gerakan, tulisan, dan lain-lain (Toha, 2011).

Secara umum, bisa dipastikan tidak ada manusia yang lepas dari siklus komunikasi. Keberadaan setiap individu memberikan peran dalam khazanah komunikasi bagi kehidupan sehari-hari. Menurut (Jayanti, 2015), semua dapat memerankan diri sebagai komunikator, termasuk komunikan sekaligus, dalam situasi apa mereka menjadi komunikator dan dalam kesempatan apa mereka menjadi komunikan, yang jelas keterlibatan tersebut tidak terhindarkan sebab manusia adalah makhluk komunikasi, apapun kepentingannya. Artinya untuk mencapai tujuan, setiap individu dapat mengekspresikan dirinya lewat komunikasi.

Provinsi Gorontalo, merupakan Provinsi yang ke 32, yang memisahkan diri dari Sulawesi utara. Provinsi Gorontalo telah membenahi diri seperti provinsi lainnya di Indonesia, dengan terbentuknya provinsi baru maka di bentuklah tiga lembaga yang sangat menentukan jalannya pembangunan daerah. Lembaga tersebut adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam penelitian ini penulis tertarik dengan lembaga legislatif di Provinsi Gorontalo, sebab di lembaga tersebut ada perempuan yang berpartisipasi didalam menentukan jalannya roda pembangunan daerah Provinsi Gorontalo. Selama ini jumlah perempuan untuk mengikuti dan menduduki lembaga legislatif di Provinsi Gorontalo terlihat sedikit dibanding wilayah atau daerah lainnya. Kondisi ini tidak dapat memenuhi kuota 30% yang diharapkan, hal ini terlihat dari tahun 2009 sampai 2014 jumlah perempuan hanya dapat menduduki 9 kursi sedang pada tahun 2014 sampai 2019 mendapat 12 kursi namun itu belum juga memenuhi tuntutan 30% sehingga penulis tertarik untuk meneliti faktor apa yang menjadi kendala sehingga perempuan di Provinsi Gorontalo kurang berminat didalam pertarungan menduduki kursi di parlemen khususnya di DPRD Provinsi Gorontalo.

Gorontalo merupakan salah satu wilayah yang masih terbatasnya posisi di ranah publik yang berhasil diraih oleh kaum perempuan, misalnya di bidang legislatif tingkat lokal, peran serta perempuan dalam mengambil keputusan sangat penting dalam pembangunan daerah, komunikasi yang dibangun untuk terlaksananya pembangunan dalam semua sektor mengingat jumlah perempuan yang dominan, sehingga merupakan indikasi mengenai besarnya kesenjangan antara peraih status perempuan dan laki-laki di bidang politik dan sektor publik.

#### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan (Arifin, 2008), menjelaskan bahwa studi kasus yaitu salah satu bentuk rancangan penelitian kualitatif. (Mulyadi & others, 2012) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ungkapan dari orang itu sendiri atau perilaku yang diamati. Pemilihan metode ini didasarkan atas pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik subyek penelitian. Menurut Nasution dalam (Haritani, 2015), hanya manusia sebagai instrumen yang dapat memahami makna interaksi antar manusia, membaca gerak muka, menyelami perasaan dan nilai-nilai yang terkandung dalam ucapan responden. Dalam penelitian kualitatif kedudukan peneliti sangatlah penting, ia sekaligus sebagai perencana, pelaksana pengumpul data, analisis dan penafsir data dan sebagai pelapor hasil penelitiannya (Moleong, 2016).

Menurut (Noor, 2011), penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang menggunakan data deskriptif, tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Metode penyelidikan deskriptif lebih merupakan istilah umum yang mencakup berbagai teknik deskriptif, diantaranya ialah penyelidikan yang menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi; penyelidikan dengan teknik survey, dengan teknik interviu, angket, observasi, atau dengan teknik test, studi kasus, studi komparatif, studi waktu dan gerak, analisa kuantitatif, studi kooperatif atau operasional, tidak mengherankan apabila mudah timbul selang surup pengertian atau keaburan batas istilah tersebut.

Menurut (Surakhmad, 2009) dalam buku “Pengantar Penelitian Ilmiah dasar metode teknik”, bahwa menurut sifatnya teknik pengumpulan data ada empat buah golongan : 1) teknik observasi langsung, yakni teknik pengumpulan data bagi peneliti mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, 2) teknik observasi tidak langsung, yakni peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki dengan perantaraan alat atau media, 3) Teknik komunikasi langsung, yakni peneliti mengadakan komunikasi langsung dengan subjek penelitian, 4) Teknik komunikasi

tak langsung, peneliti dalam pengumpulan data mengadakan komunikasi dengan subjek melalui alat bantu atau media.

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian dan untuk menjawab pertanyaan. Observasi digunakan untuk mengamati pelaksanaan program kegiatan dan atau kegiatan lainnya, pada dasarnya observasi dilaksanakan dalam rangka kegiatan penelitian deskriptik yang dilakukan peneliti (Sukmadinata, 2005). Dengan demikian rekaman data yang penulis susun dalam bentuk catatan lapangan dapat dilengkapi melalui wawancara.

Teknik pengumpulan data yang kedua yakni dengan melakukan wawancara. wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk melengkapi dan memperdalam hasil penelitian, untuk memperoleh data. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini untuk menggali informasi yang berkenaan dengan fokus penelitian. Wawancara yang dilakukan selama penelitian adalah wawancara formal (wawancara terstruktur) dengan menggunakan pedoman wawancara, yang pelaksanaannya terikat dengan pedoman yang telah ada adapun daftar pertanyaan yang ada dalam pedoman wawancara merupakan acuan untuk mengarahkan pada fokus penelitian dan kedua wawancara tidak formal atau tidak berstruktur (wawancara bebas), dalam hal ini wawancara dilakukan dengan cara penguasaan pokok oleh peneliti tanpa daftar pertanyaan, dilakukan seperti percakapan kecil.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Politisi perempuan di DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2014-2019 menunjukkan angka relatif hanya berjumlah 28,9 %, dari 45 anggota Legislatif yang ada sekarang, sehingga dapat di kategorikan dapat di akomodir dan hampir terpenuhi sesuai dengan undang-undang pemilu no. UU No 12 Tahun 2003 kuota 30% di legislatif hampir terpenuhi, ini mebujukan angka yang yang menggembiran buat kaum perempuan, sebab harapan akan terakomodir suara dan haka-hak perempuan akan lebih banyak di pertimbangkan dengan jumlah keberadaan politis perempuan yang ada sekarang.

**Tabel 1**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>ASAL PARTAI</b>
1	Yusna Tolingguhu,	Ketua Fraksi	(FPG)
2	Venny Rosdiana Anwar	Ketua Fraksi PDIP	(FPDIP)
3	Nurjannah, SH, ST.	Sekretaris Komisi	(FPHANURA)
4	Espin Tuli, SE.	Wakil Ketua	(FPDIP)
5	Sintje Kadji	Wakil Ketua	(FPKB)
6	Yeyen Saptiani Sidiki,	Bendahara	(FPG)
7	Suharsi Igirisa, S.IP, M.Si	Anggota	(FPG)

8	Dra. Hj. Sriani Hadju	Anggota	(FPDIP)
9	Conny Gobel	Anggota Komisi IV	(FPAN)
10	Haspida Tajudin	Anggota	(FPHANURA)
11	Loly Yunus	Anggota	(FPAN)
12	Dra. Hj. Nikma Tahir	Anggota	(FPG)
13	Adriana Muharastina	Anggota Komisi II	(FPGERINDRA)

Sumber data: Dari DPRD Provinsi Gorontalo 2015

Dilihat segi pendidikan Jumlah Anggota Legislatif Perempuan yang pendidikan dan menyelesaikan S2 ada = 4 (empat) orang dan yang berpendidikan dan menyelesaikan S1 ada = 7 (tujuh) orang serta yang sisanya penyelesaian sekolah menengah atas berjumlah = 2 (dua) orang.

Jika dilihat dari segi tingkat pendidikan, dapat dikategorikan Anggota DPRD Perempuan di Provinsi Gorontalo merupakan perempuan-perempuan yang punya potensi untuk menjadi wakil rakyat, sehingga tidak meragukan lagi untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di parlemen, dari dua tahun sebelumnya kita dapat melihat bahwa keberadaan perempuan di legislatif Provinsi Gorontalo mengalami kemajuan dari 5 orang perempuan di tahun 2004 meningkat di periode selanjutnya tahun 2009 menjadi 8 orang perempuan, dan sekarang di tahun 2004-2019 menjadi 13 orang, angka yang sangat menggeburkan, hal ini bahwa kesadaran berpolitik kaum perempuan di Gorontalo mulai nampak dan tuntutan kuota 30 % hampir terpenuhi, sudah saatnya partai pendukung membuat strategi memberikan pengkaderan dan menambahkan muatan-muatan ilmu politik untuk perempuan yang menjadi calon legislatif ke depan. Menurut (Katili, 2018) bahwa suara perempuan perlu juga didengar, karena berbagai kebijakan pasti akan memengaruhi kaum Perempuan dimana pun mereka berada di berbagai tingkatan.

Dari hasil wawancara penulis dari 12 informan yang terdiri dari Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo juga dari unsur perempuan, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang memiliki perhatian (*concent*) terhadap kesetaraan gender di DPRD Provinsi Gorontalo. maka dapat diringkas berdasarkan fokus penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran anggota legislatif perempuan mendapat support dari kalangan laki-laki yang lebih banyak jumlah dan mendominasi anggota DPRD Provinsi Gorontalo, anggota legislatif perempuan menjadi pertimbangan pada keputusan yang akan di putuskan, sebab anggota legislatif perempuan adalah wakil rakyat yang madapat kepercayaan dari konstituwen mereka didaerah pemilihan masing-masing, sehingga komunikasi politik mereka dapat di pertimbangkan dan menjadi penyerpuna sebuah keputusan.

Hasil wawancara kunci Anggota Legislatif pada hari senin tanggal 22 Agustus 2016 jam 13.00. selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan hasil wawancara Anggota Legislatif di atas (KDPRDPG/PJ), ada kekuatiran tentang

potensi perempuan sebagai anggota legislatif perempuan pada dasarnya sangat di harapkan namun hal ini apa sudah sesuai dengan kapasitas sebagai anggota dewan yang mampu berkomunikasi dengan baik dalam menyampaikan aspirasi rakyat.

Berdasarkan hasil wawancara salah satu informan tersebut diatas dapat di nyatakan bahwa keberadaan Anggota legislatif Perempuan perempuan di DPRD Provinsi Gorontalo, mereka dapat mengungkapkan aspirasi mereka di dalam forum-forum sidang walaupun kadang ada juga pendapat-pendapat yang bersebrangan dengan teman komisi dan ada juga teman sesama partai dan tidak menutup kemungkinan kesekretariatan sebab masing-masing beda persepsi, namun semua dapat diatasi dengan di komunikasikan dengan baik dalam lingkungan semua hak-hak anggota legislatif baik laki-laki dan perempuan selalu di perlakukan sama didalam mengungkapkan aspirasi tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan semua sama untuk membela kepentingan rakyat.

Berdasarkan hasil wawancara pada informan salah satu anggota Legislatif Perempuan (YS) hari senin tanggal 22 Agustus tahun 2016 pukul 11.00 terungkap bahwa tuntutan undang-undang tentang keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Gorontalo hampir mencapai 30%, namun keberadaan perempuan yang 28,8% merupakan hasil sangat luar biasa di banding tahu-tahun kemarin, jumlah yang sangat membaggakan hal ini dapat di artikan bahwa pemahaman masyarakat terhadap perempuan yang akan di pilih untuk duduk di DPRD Provinsi Gorontalo, bukan hal yang di ragukan sebab komunikasi yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik.

Anggota legislatif Perempuan yang ada pada periode 2014-2019 memberikan cakrawala berfikir bagi kaum laki-laki untuk banyak mensupport kaum perempuan yang akan maju menjadi anggota legislatif hal ini dukungan seorang laki-laki sangat membantu didalam membela kepentingan hak-hak perempuan itu sendiri, sebab laki-laki yang memberi dukungan bagi seorang perempuan adalah laki-laki yang telah memahami akan kebutuhan negara yang kita cintai ini. Anggota legislatif perempuan yang ada sekarang di DPRD Provinsi Gorontalo memberikan nilai positif di lingkungan DPRD Provinsi Gorontalo sebab dari 13 orang perempuan yang ada sehingga forum sidang selalu memberikan kontribusi pada masing-masing keputusan, semua keputusan di sepakati oleh sidang disitu ada suara perempuan yang di menjadi pertimbangan untuk dijadikan sebuah keputusan.

Di dalam penyampaikan argumen-argumen menjadi perhatian penuh di forum sidang-sidang, sebab menurut (Pambumdi, 2007), suara politisi perempuan selalu diperhitungkan jika keterlibatan perempuan dipandang sebagai peluang untuk sebuah kemajuan, maka ranah politik akan marak dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan dan membawa kebaikan bersama. Betapapun semangat dari anggota legislatif perempuan namun ada beberapa kendala kecil yang

menjadi hambatan kegiatan seorang anggota legislatif perempuan antara lain kendala adalah:

### **Disiplin Diri**

Disaat jadwal sidang akan ditetapkan maka sebagian anggota legislatif perempuan terkadang hadir datang rapat masih ada yang belum tepat waktu, dengan alasan berbeda-beda, tugas domestik mengurus anak dan keluarga sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga sebagai publik figur, datang di tempat sidang dengan mendengarkan hasil-hasil sidang dan sengaja mengutak-atik alat elektronik, menghindari persoalan-persoalan yang sedang di bahas.

### **Pengalaman Organisasi**

Anggota Legislatif Perempuan yang duduk di DPRD Provinsi Gorontalo sekarang berjumlah 13 orang di lihat dari segi pendidikan lulusan S2 dengan berbagai macam ilmu berjumlah 3 Orang dan S1 berjumlah 8 Orang serata SMA berjumlah 2 orang dalam hal ini pendidikan adalah salah satu kunci didalam melakukan komunikasi didalam forum persidangan sehingga penyampaian argumen yang di dukung pendidikan yang memadai akan menjadi salah satu pertimbangan, sebab itu anggota legislatif perempuan yang duduk sekarang adalah perempuan-perempuan mapan dari segi pendidikan, organisasi adalah salah satu wadah didalam berkumpul satu kelompok yang memberikan kontribusi didalam menjalankan tugas, karena diyakini dapat memberikan perubahan positif dalam proses pembuatan kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat, menurut (Tinov & Erwinda, 2015), seorang wakil rakyat mampu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan didaerah pemilihan sehingganya di tuntut harus mampu memiliki pengalaman-pengalaman berorganisasi, perempuan yang ada di DPRD Provinsi Gorontalo di tuntut agar berkerja sama dengan oraganisasi perempuan yang ada di Provinsi Gorontalo melihat peran aktif anggota legislatif perempuan masih belum maksimal untuk menghimpun aspirasi-aspirasi perempuan dan kegiatankegiatan perempuan yang ada di kalangan bawah atau desa dan sampai di kalangan tingkat wilayah yang ada di Provinsi Gorontalo.

### **Budaya Kultural**

Terkadang didalam forum sidang walaupun mengungkapkan argumen begitu semangat namun budaya mengikuti aturan partai itu juga tidak semena-mena untuk di langgar sebab aturan yang ada pada satu organisasi partai, masing-masing partai selalu ada komando dan aturan, sehingga budaya diam akan terjadi memilih diam juga adalah satu keputusan seorang anggota legislatif sebab aturan dan sanksi akan diberikan pada seorang anggota legislatif yang melanggar peraturan yang ada di masing-masing partai itu sendiri. Sehingga kesempatan untuk berargumen menjadi kendala bagi anggota legislatif (Zamroni, 2013).

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa komunikasi politik anggota legislatif Perempuan di DPRD Provinsi Gorontalo masih belum maksimal. Walaupun jika di lihat dari segi kuantitas mereka yang duduk di DPRD Provinsi Gorontalo dengan jumlah 28,8% hampir memenuhi 30 %, yang di harapkan oleh undangundang, hal ini menunjukkan bahwa dengan kedudukan yang sama seorang politisi perempuan belum tentu memiliki peran yang sama, karena banyak kendala yang dihadapi antaranya, tingkat pendidikan, latar belakang organisasi, pengalaman, dan intens komunikasi yang dibangun politisi perempuan dengan orang lain. Jika keterlibatan perempuan dipandang sebagai peluang untuk sebuah kemajuan, maka ranah politik akan marak dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan bagi masyarakat dan membawa kebaikan bersama masyarakat karena tidak ada kelompok yang ditinggalkan.

Menurut (Sahi, 2012), kendala yang dihadapi oleh seorang politisi perempuan didalam memperjuangkan hak-haknya, kadang ada di lingkungan sendiri, didalam menyampaikan aspirasi mereka didalam sidang untuk menunjukan bahwa suara mereka di dalam sidang-sidang dapat di perhitungkan untuk menjadi satu keputusan namun kadang terkendala dengan kurangnya dukungannya sesama antar partai sesama komisi dan tidak menutup kemungkinan ada yang sesama perempuan itu sendiri, hal itu dengan menunjukan kefakuman serta memilih diam tanpa ada komentar apa-apa. menjadi perwakilan dari partai itu sendiri.

Penulis berharap agar partai asal dari perempuan yang akan maju di parlemen agar dapat memperhatikan sumber daya manusia (SDM), dan ada proses pengkaderan untuk memilih dan memilah siapa perempuan yang mampu untuk menjadi wakil rakyat yang dapat mengemban amanah rakyat, hendaknya politisi perempuan meningkatkan kapasitas kemampuan untuk banyak belajar khususnya ilmu politik (Velashy et al., 2013). Partai Politik dapat menciptakan calon anggota legislatif perempuan yang berkualitas, yang memiliki program-program yang dapat memberikan kemajuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di parlemen. Dan tingkat pendidikan politik masih rendah di kalangan perempuan untuk berkomunikasi dalam perjuangan kepentingan kaum perempuan pada forum-forum rapat penentuan kebijakan yang harus membela kaum perempuan dan ada kaitanya dengan pembelaan hak-hak perempuan yang ada di Provinsi Gorontalo.

Perlu adanya sosialisasi di kalangan pemilih atau masyarakat bagaimana memilih partai politik maupun calon anggota legislatif yang memiliki program pemberdayaan perempuan serta memiliki keberpihakan terhadap perempuan. Harapan agar perempuan-perempuan yang ada di DPRD Provinsi Gorontalo, agar membangun jejaring dengan organisasi perempuan yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo, termasuk BKOW dan LSM yang membela Hak-hak perempuan. Dengan adanya kerjasama antar organisasi perempuan sehingga akan menjadi

perhatian dan akan terakomodir seluruh kebutuhan perempuan yang ada di tingkat Desa sampai di Provinsi Gorontalo,

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2008). *Metode Penelitian*. Remaja Rosdakarya.
- Haritani, H. (2015). The Implementation of the Islamic Faith and Obedience with Collaborative Design on the First Students of Karangjengkong Mataram in The School. *Proceeding Icete 2016*, 287.
- Jayanti, N. A. (2015). Komunikasi Kelompok “Social Climber” Pada Kelompok Pergaulan di Surabaya Townsquare (Sutos). *Jurnal E-Komunikasi*, 3(2).
- Katili, A. Y. (2018). Analisis Partisipasi Politik Perempuan di Organisasi Partai Hanura Kota Gorontalo Dalam Pemilihan Anggota Legislatif 2014. *Proceedings of International Interdisciplinary Conference on Sustainable Development Goals (IICSDGs)*, 1(1), 1–7. <https://journals.ubmg.ac.id/index.php/IICSDGs/article/view/25>
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdaya.
- Mulyadi, M., & others. (2012). Riset desain dalam metodologi penelitian. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 16(1), 71–80.
- Noor, J. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Pambumdi, M. Y. (2007). Perempuan Dan Politik Studi Tentang aksesibilitas Perempuan Menjadi Anggota Legislatif di Kabupaten Sampang. *Skripsi. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Univ. Airlangga*.
- Sahi, N. A. (2012). Studi partisipasi politik perempuan kabupaten gorontalo. *Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)*, 8(1).
- Sukmadinata, S. N. (2005). *Metode penelitian*. In Bandung: PT remaja rosdakarya.
- Surahmad, W. (2009). *Pengantar Penelitian Ilmiah Metode Dasar dan Teknik*. Bandung: Bumi Cipta.
- Tinov, T., & Erwinda, E. (2015). *Motivasi Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Asal Riau pada Pemilihan Umum 2014*. Riau University.
- Toha, M. (2011). *Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: PT. Kencana.
- Velashy, A., Ismanto, G., & Widyastuti, Y. (2013). *Tingkat Partisipasi Pemilihan Perempuan Dalam Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kota Tangerang Periode 2009-2014*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Wahyuningrum, M. M. (2008). Efektivitas Saluran Komunikasi Organisasi. *Jurnal Manajemen Pendidikan UNY*, 112818.
- Zamroni, M. (2013). *Perempuan dalam kajian komunikasi politik dan gender*.